BAB II

GAMBARAN UMUM PT.(Persero) ANGKASA PURA II

UNIT PELAKSANA KNS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1 Sejarah Singkat Berdirinya PT.(Persero) ANGKASA PURA II

Kebutuhan mesyarakat akan transportasi berkembang seiring dengan kemajuan ilmu teknologi seta peradaban manusia itu sendiri. Sebelumnnya manusia menganggap tidak mungkin ada manusia yang mampu terbang mengarungi angkasa. Namun anggapan ini pupus setelah metode penerbangan ditemukan. Metode yang semula sangat sederhana dikembangkan hingga akhirnya menghasilkan metode-metode yang canggih dan modern. Yang dulunya hanya berupa *gantole* sekarang telah berkembang dengan digunakannya teknologi *jet*.

Perkembangan teknologi tentunye akan sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Negara Indonesia sendiri mengenal istilah penerbangan ketika pemerintah Hindia Belanda (sebelum perang dunia II) menduduki wilayah Nusantara. Hindia Belanda lalu membuat lapangan terbang diberbagai daerah termasuk di Bandung. Lapangan terbang tersebut diberi nama Lapangan Terbang Andir. Ketika pemerintah Jepang mengambil alih kepemerintahan lapangan terbang tersebut dijadikan Basis Angkatan Udara Kakaisaran Jepang. Dan setelah Indonesia merdeka sesuai dengan peraturan yang berlaku lapangan tersebut diserahkan pengelolaannya kepada TNI – AU (Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Udara) dengan statua Lapangan Terbang Militer. Sejak saat itu berganti nama menjadi Pangkalan Udara

Utama Husein Sastranegara Bandung. Husein Sastranegara diambil dari nama seorang penerbang militer yang gugur saat lataihan terbang di Yogyakarta.

Sekitar tahun 1955 penerbangan sipil pernah dilakukan namun belum terjadwal oleh perusahaan GIA (Garuda Indonesia) tetapi sempat terhenti kerena terdapat kendala berupa buruknya kondisi topografis daerah Bandung tidak didukung oleh fasilitas penunjang kegiatan penerbangan yang layak. Seiring berjalannya waktu dilakukan perbaikan – perbaikan hingga pada tahun 1974 didirikanlah Kantor Perwakilan Direktorat Jendral Perhubungan Udara dengan nama Stasiun Udara Husein Sastranegara Bandung telah siap melakukan kegiatan pelayanan lalulintas dan angkutan udara komersial secara resmi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna jasa angkutan udara, maka beberapa pangkalan udara termasuk pangkalan udara Husein Sastranegara Bandung ditetapkan sebagai "*enclave civil*" yaitu suatu daerah terbatas yang berada disebuah pangkalan udara militer, dimana berlaku peraturan sipil serta menyelenggarakan pelayanan lalulintas udara tersebut dilakukan/dikelola oleh sipil (bukan militer). Pada tanggal 21 Agustus 1975 ditetapkan suatu kesepakatan tentang Dasar-Dasar Penggunaan Bersama Pangkalan/ Pelabuhan Udara melalui SKB Menteri Pertahanan Keamanan / Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan. Dengan SKB Nomor Kep/30/IX/1975, Nomor : KM 393/S/PHB-75, Nomor : Kep 927A/MK/IV/8/1975. sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50/OT.002/PHB-1978 Kantor Perwakilan Ditjen Perhubungan Udara tersebut menjadi Pelabuhan Udara Husein Sastranegara Bandung sebagai Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Ditjen

Perhubungan Udara dengan Klasifikasi Pelabuhan Kelas III lalu pada tahun 1983 berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 68/HK 207/PHB-83 klasifikasinya ditingkatkan menjadi Kelas II. Mulai tahun 1994 pengelolaan bandar udara diserahkan dari Departemen Perhubungan kepada PT.(Persero) ANGKASA PURA II hingga sekarang.

Tanggal 13 Agustus 1984 berdasarkan PP Nomor 20 tahun 1984 didirikan Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng. Selanjutnya dibentuk pula Organisasi dan Tata Kerja Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng berdasarkan KM Perhubungan Nomor KM 6/OT 002/PHB 85 tanggal 2 Januari 1985. Bulan Maret 1985 dilakukan pemindahan Operasi berjadwal dari bandara Kemayoran dan Halim PK ke Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng dan baru dioperasikan secara penuh pada 1 April 1985 sekaligus mengalihkan menejemen Bandara Halim Perdana Kusuma dari perum Angkasa Pura ke Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng. Penggantian nama Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng menjadi Bendar Udara Internasional Jakarta Soekarno Hatta berdasarkan Keputusan Presiden No. 54/1985 pada tanggal 3 Juli 1985. Sedangkan Perum Pelabuhan Udara Cengkareng diubah menjadi Perum Angkasa Pura II berdasarkan atas PP No. 26/1986. Tanggal 14 Maret 1987 menurut SK No.21/OT.002/PHB-87 ditetapkan kembali Organisasi Tata Kerja Perum AP II. Tanggal 19 Februari 1991 penambahan penyertaan modal Negara di Bandara Halim PK ke dalam modal Perum AP II. Tahun 1991 PP No.10 tahun 1991 tentang penambahan pengelolaan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dan Bandara Supadio Pontianak. Tanggal 17 Maret 1992 PP No. 14 tahun 1992

tentang perubahan status hukum dari Perum menjadi Persero. Tanggal 2 Januari 1993 pendirian PT.(Persero) ANGKASA PURA II berdasarkan akte notaries Muhani Salim SH No. 3 tanggal 2 Januari1993. Tanggal 22 Januari 1994 Keputusan Menteri Keuangan No. 533/MK/94 tentang tambahan pengelolaan Bandara Polonia Medan. Tanggal 9 April 1994 Keputusan Menteri Keuangan No. 533/MK 016/94 tentang penambahan pengelolaan Bandara Sultan Syarif Kasim Palembang, Bandara Tabing Padang, Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh dan Bandara Husein Sastranegara Bandung. Menurut Keputusan Menteri tahun 200 PT.(Persero) ANGKASA PURA II menambah daftar pengelolaan Bandara dengan masuknya Bandara Kijang Tanjung Pinang hingga sekarang.

Misi, Visi dan Tujuan PT.(Persero) ANGKASA PURA II

Pegangan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat dituangkan dalam misi, visi dan tujuan yang merupakan pendorong semangat bagi setiap fungsi yang terdapat dalam perusahaan. Misi, visi dan tujuan PT.(Persero) ANGKASA PURA II adalah :

1. Misi

   Misi adalah tugas yang merupakan kewajiban seseorang untuk dilaksanakan demi suatu alasan. PT.(Persero) ANGKASA PURA II memiliki misi-misi yang menjadidasar pelaksanaan usahanya yaitu :

   "Mengelola jasa kebandarudaraan dan pelayanan lalulintas udara yang mengutamakan keselamatan penerbangan dan kepuasan pelanggan dalam upaya

memberikan manfaat oprimal kepada pemegang saham, mitra kerja, pegawai, masyarakat dan lingkungan dengan memegang teguh etika bisnis".

2. Visi

Selain misi setiap perusahaan juga mempunyai visi yang jelas. Arti visi sendiri adalah kemampuan untuk dapat melihat pada inti persoalan, pandangan terhadap masalah, serta wawasan untuk mengatasi hambatan demi tercapainya tujuan. Visi PT.(Persero) ANGKASA PURA II adalah :

"Menjadi pengelola Bandar udara bertaraf Internasional yang mampu bersaing di kawasan regional".

3. Tujuan

Tujuan dapat berarti maksud atau tuntutan. Tujuan pasti PT.(Persero) ANGKASA PURA II diantaranya :

a. Melaksanakan serta menunjang kebijaksanaan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan
b. Memupuk keuntungan bagi Perseroan dengn menyelenggarakan usaha jasa kebandarudaraan dalam arti seluas-luasnya serta melakukan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan jasa kebandarudaraan.

2.2 Struktur Organisasi PT.(Persero) ANGKASA PURA II

Setiap bentuk perkumpulan baik secara resmi maupun tidak semestinya memiliki peta tanggung jawab yang pasti. Hal ini dimaksudkan agar setiap pegawai dapat melaksanakan tanggung jawab fungsionalnya dengan kewenangan

sesuai dengan tugas masing – masing sehingga tercipta suasana kerja yang saling mendukung dan selaras demi tercapainya visi dan misi yang diinginkan. Peta tanggungjawab ini umumnya dikenal dengan struktur organisasi. PT.(Persero) ANGKASA PURA II sendiri menggunakan struktur organisasi berbentuk lini dimana arus kewenangan bergerak dari atas ke bawah.

PT.(Persero) ANGKASA PURA II merupakan kantor cabang dari Halim Perdana Kusuma daerah operasi Bandung selain dari Padang, Pekan Baru, Pelembang serta Pontianak. Pada setiap kantor cabang memiliki peta tanggungjawab yang sama yaitu terdiri atas seorang Kepala Cabang yang membawahi langsung tiga Kepala Divisi.

1. Kepala Divisi Pelayanan Operasi. Dibawahnya terdapat tiga kepala dinas yaitu
   a. Kepala Dinas Pelayanan Operasi LLU
   b. Kepala Dinas Pelayanan Operasi Bandara
   c. Kepala Dinas Pelayanan PKP-PK & PAM
2. Kepala Divisi Teknik. Dibawahnya terdapat tiga kepala dinas yaitu :
   a. Kepala Dinas Teknik Elektronika
   b. Kepala Dinas Teknik L.M.P.
   c. Kepala Dinas Teknik Umum
3. Kepala Divisi Administrasi & Komersial. Dibawahnya terdapat tiga kepala dinas yaitu :
   a. Kepala Dinas Komersial
   b. Kepala Dinas Keuangan & Perlengkapan

c. Kepala Dinas Akuntansi

d. Kepala Dinas Kepegawaian dan Umum

2.3 Deskripsi Jabatan PT.(Persero) ANGKASA PURA II

Tujuan disusunnya struktur organisasi adalah untuk menegaskan secara pasti mengenai tanggung jawab, kewenangan, otoritas dan tugas masing-masing divisi. Deskripsi jabatan PT.(Persero) ANGKASA PURA II tersebut akan diuraikan secara sederhana dibawah ini.

1. Kepala Cabang

   a. Bertugas menyelenggarakan kesiapan sarana, prasarana, pengendalian jasa kebandarudaraan dan keselamatan penerbangan sesuai dengan pedoman dan kebijakan Direksi

   b. Bertugas dan berfungsi menyelenggarakan pengelolaan pengusahaan pelayanan dan kebijakan Direksi

   c. Menyelenggarakan pengendalian kegiatan administrasi sesuai dengan pedoman dan kebijakan Direksi

   d. Menyelenggarakan pembinaan, pengembangan sumber daya manusia yang ada

   e. Melaksanakan tugas-tugas lain diluar tugas pokok yang sudah digariskan dan dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Direksi

   f. Menyelenggarakan penyediaan, pengelolaan kegiatan usaha lain yang berhubungan dengan jasa kebandarudaraan

f. Menyelenggarakan penyediaan, pengelolaan kegiatan usaha lain yang berhubunga dengan jasa kebandarudaraan

2. Kepala Divisi Pelayanan Operasi

a. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pelayanan operasi lalu lintas udara, operasi bandara serta pelayanan dalam hal pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran dan pengamanan Bandar Udara

b. Memimpim, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada unit kerja lingkungan Divisi Pelayanan Operasi

c. Melaksanakan pembinaan pembinaan peningkatan profesionalisme dan karier SDM, tata kerja (prosedur) operasional dalam menjalakan tugas pelayanan operasi

d. Melaksanakan koordinasi dengan Divisi lain untuk kelancaran tugas baik secara operasional maupun administrasi kebandarudaraan

3. Kepala divisi Teknik

a. Merencanakan, melaksanakan dan menyiapkan semua fasilitas-fasilitas teknik elektronika, fasilitas listrik, mekanikal dan peralatan serta teknik umum

b. Menyiapkan dan melaksanakan perbaikan fasilitas yang berupa sarana dan prasarana Bandar Udara dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional

c. Menyiapkan dan melaksanakan pembangunan darana dan prasarana Bandar Udara untuk pengendalian dan pengawasan sesuai dengan pelimpahan kewenangan yang diberikan

d. Melakukan koordinasi dengan lanud husein sastranegara dan PT. Dirgantara Indonesia serta unit lain diluar PT.(Persero) ANGKASA PURA II

4. Kepala divisi Administrasi & Komersial

a. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan usaha komersial, keuangan dan perlengkapan

b. Merencanakan, menyiapkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan umum

c. Menyiapkan dan mengawasi pelaksanaan intruksi yan telah diberika dan mengoreksi bila terdapat kesalahan

d. Merencanakan dan melaksanakan usaha pembinaan, peningkatan dan pengembangan SDM secara umum di kantor cabang

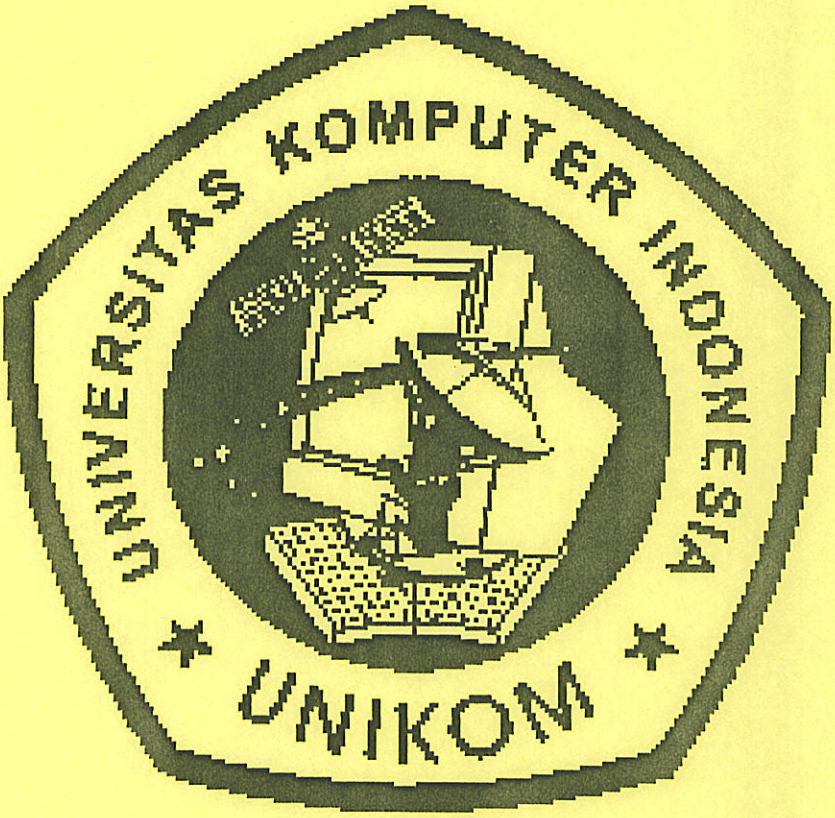
e. Melaksakan tugas-tugas pokok sesuai dengan perintah atasan

2.3 Aspek Kegiatan PT.(Persero) ANGKASA PURA II

Usaha pokok PT.(Persero) ANGKASA PURA II adalah jasa pelayanan kebandarudaraan. Ruang lingkup usaha secara keseluruhan meliputi:

1. Penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan (*landing*), lepas landas (*take-off*), parkir dan penyimpanan pesawat udara
2. Penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, *cargo* dan pos

3. Penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas elektronika, navigasi, listrk, air dan instalasi limbah
4. Jasa pelayanan penerbangan
5. Jasa penunjang kegiatan penerbangan dan kebandarudaraan
6. Penyediaan lahan untuk bangunan, lapangan serta industri dan bangunan/gedung yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara
7. Jasa konsultasi, pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan kebandarudaraan
8. Usaha-usaha lain yang berkaitan dengan jasa kebandarudaraan yang dapat menunjang tujuan perusahaan


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM